

Peran Struktur Sosial Dalam Pembangunan Sarana Prasarana Permukiman Perkotaan (Studi Kasus: PLPBK Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta)

Yanuar Kusuma Wardani, Yori Herwangi, Ahmad Sarwadi

Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada, Jl. Grafika No. 2 Kampus UGM, Yogyakarta, 55281

Email: yanuarkusumaw@gmail.com; yherwangi@ugm.ac.id; sarwadi@ugm.ac.id

Abstract

Social structure is one of the important elements in development. Elements in the social structure will form relationships and form joint actions on the program. PLPBK Program in Karangwaru Village, Tegalrejo Sub-District, Yogyakarta City has focus on society. Social life is closely related to social structure. Based on the explanation, the purpose of this research is to determine the role of social structure in the PLPBK program in Karangwaru Village. The approach of this research is deductive qualitative. The method of analysis used is descriptive qualitative. Methods of data collection using field observation, secondary survey, and primary survey. Sampling technique of primary survey using non-probability sampling that is purposive sampling. The results showed that the social structure in Karangwaru Village has positive and negative role in the PLPBK program. Social institutions, social groups, power and authority, and culture have positive role while social stratification and social dynamics have positive and negative role. The function of social structures such as maintaining patterns, integration, achieving objectives, and adaptation has been demonstrated by the social structure in the PLPBK program at Karangwaru Village.

Keywords: *Development; Infrastructure; Social Structure; Society*

Pendahuluan

Permasalahan perkotaan yang menjadi fokus utama pemerintah dalam menciptakan kawasan permukiman layak huni ialah pemberantasan permukiman kumuh. Masalah permukiman kumuh dapat diatasi dengan adanya penataan permukiman. Penataan permukiman erat kaitannya dengan urusan pemerintah. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan satu dari enam pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib. Urusan pemerintahan wajib ini merupakan urusan pemerintahan konkruen dimana urusan pemerintahanya dibagi antara pemerintah pusat dan daerah

provinsi dan daerah kabupaten/kota. Penataan Permukiman pada permukiman perkotaan, tidak hanya melibatkan pemerintah daerah kota yang menjadi wadah dari lingkup penataan namun juga pemerintahan daerah provinsi sampai dengan pemerintah pusat. Terdapat hubungan yang erat antar pemerintah karena sebagian besar dana yang digunakan untuk penataan permukiman ialah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari pemerintah pusat yang disalurkan terhadap provinsi dan kota agar menjalankan urusan pelayanan dasar. Salah satunya melalui program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK).

Pada tahun 2007, Yogyakarta merupakan salah satu kota yang mendapat perhatian terkait permasalahan permukiman kumuh, dimana tercatat sebanyak 29 kelurahan teridentifikasi memiliki kawasan kumuh terutama pada bantaran sungai (Muta'ali dan Nugroho, 2016). Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) merupakan salah satu langkah yang diambil pemerintah sejak tahun 2008-2015. Berdasarkan profil PLPBK Kota Yogyakarta Tahun 2014, sudah sebanyak 785 kelurahan diseluruh Indonesia yang menerima program PLPBK. Kelurahan Karangwaru merupakan kelurahan pertama di Kota Yogyakarta yang mendapatkan program PLPBK pada tahun 2009 karena memiliki kawasan permukiman kumuh terutama pada Bantaran Sungai Code dan Sungai Buntung. Program PLPBK yang dilaksanakan mengedepankan unsur-unsur masyarakat dalam pencapaian tujuan program dimana kolaborasi pada semua elemen masyarakat diharapkan mampu menjaga keberlanjutan program. Program PLPBK juga digerakkan sebagai salah satu upaya dalam pembangunan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat peka terhadap lingkungan atau ruang yang mereka huni. Kehidupan dalam masyarakat merupakan jalinan dari unsur-unsur sosial masyarakat yang membentuk struktur sosial. Struktur sosial merupakan suatu bangunan sosial dari berbagai unsur pembentuk masyarakat (Setiadi dan Kolip, 2011). Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa dengan struktur sosial yang telah terbentuk akan berperan dalam pembangunan sarana prasarana melalui program PLPBK yang dilaksanakan di Kelurahan Karangwaru.

Abdulsyani (1994) menyebutkan bahwa terdapat 4 fungsi dari struktur sosial

yaitu mempertahankan pola, integrasi, pencapaian tujuan, dan adaptasi. Mendukung pernyataan Abdulsyani, Supriatna dalam Yonaldi (2015) menyebutkan bahwa struktur, kultur, dan proses sosial merupakan dasar dari pembangunan permukiman. Struktur sosial dalam pembangunan memberikan pandangan terhadap prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dalam pelaksanaan program, membuat masyarakat menjadi terkoordinasi dalam suatu sistem pada program, memobilisasi masyarakat dalam penentuan dan pencapaian tujuan yang harus dilaksanakan dalam program, serta hubungan yang didasarkan pada struktur sosial mampu menjadi sarana masyarakat dalam menyesuaikan terhadap perubahan lingkungannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indriani (2017) diketahui bahwa sumberdaya dan aturan sosial yang berada dalam struktur sosial dapat menjadi pendorong atau penghalang dalam melakukan tindakan. Kinseng (2017) juga menyampaikan dalam penelitiannya bahwa tindakan aktor dipengaruhi oleh struktur baik struktur sosial maupun fisik-material.

Beberapa teori dan penelitian diatas telah menjelaskan bahwa pada dasarnya struktur sosial memiliki hubungan dengan pelaksanaan program namun belum ada penelitian yang menjelaskan bagaimana setiap unsur-unsur di dalam struktur sosial memberikan peran terhadap pelaksanaan program atau unsur-unsur seperti apa yang lebih mendominasi dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, sangat penting melihat kontribusi unsur-unsur struktur sosial seperti lembaga sosial, kelompok sosial, kekuasaan dan wewenang, stratifikasi sosial, kebudayaan, dan dinamika sosial dalam suatu program

sehingga akan menunjukkan bagaimana struktur sosial terbentuk dan nantinya diketahui juga bagaimana sistem sosial dalam masyarakat. Berdasarkan penjelasan latar belakang dan permasalahan yang disebutkan sebelumnya maka penelitian ini ingin mengetahui peran struktur sosial dalam program PLPBK Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta. Unsur-unsur dalam struktur sosial pada program PLPBK memberikan beberapa gambaran terkait unsur yang berperan positif maupun negatif dalam pelaksanaan program PLPBK di Kelurahan Karangwaru.

Tinjauan Teoritis

A. Permukiman Kumuh

Pada Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 menyatakan bahwa permukiman kumuh memiliki ciri-ciri bangunan yang tidak teratur, kepadatan bangunan tinggi, serta sarana dan prasarana memiliki kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat. Sejalan dengan itu, Judohusodo dalam Rindarjano (2012) juga menyebutkan bahwa permukiman kumuh merupakan hunian yang tidak teratur dengan ketidaktersediaan fasilitas umum baik sarana maupun prasarana serta bentuk fisik bangunan dalam keadaan tidak layak huni. Gans dalam Muta'ali dan Nugroho (2016) melihat dari sisi lainnya dimana permukiman kumuh mengandung unsur munculnya tanda atau cap yang diberikan oleh kelompok atas yang telah mapan kepada kelompok bawah yang belum mapan. Berdasarkan beberapa teori diatas dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh merupakan permukiman yang mengalami penurunan atau memang terbentuk dalam kondisi fisik lingkungan yang tidak layak untuk dihuni karena

ketidaksesuaian letak bangunan, kondisi bangunan, kepadatan, fasilitas, dan lingkungannya dengan standar layak huni. Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2016 menyebutkan terdapat beberapa karakter permukiman kumuh yaitu:

1. Merupakan suatu entitas perumahan dan permukiman yang mengalami degradasi kualitas;
2. Kondisi bangunan memiliki kepadatan tinggi, tidak teratur, dan tidak memenuhi syarat;
3. Kondisi sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat.

B. Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK)

Pedoman pelaksanaan PLPBK tahun 2010 menyebutkan bahwa Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) merupakan transformasi akhir dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). Program PLPBK dikembangkan tidak hanya menekankan pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan melainkan juga memperhatikan perubahan perilaku masyarakat yang sejalan dengan penciptaan lingkungan yang kondusif di berbagai aspek kehidupan manusia. Pembangunan fisik yang ada di Kelurahan Karangwaru nantinya akan menjadi media belajar masyarakat terutama pada perubahan perilaku. Menurut pedoman pelaksanaan PLPBK tahun 2010 juga disebutkan bahwa tujuan utama dari program ini ialah mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis dengan lingkungan hunian yang sehat, tertib, dan lestari sedangkan tujuan antara program PLPBK ialah terorganisasinya masyarakat kelurahan dalam rangka meningkatkan

kondisi permukiman dan pelayanan publik, terlaksananya proses perencanaan penataan lingkungan permukiman secara partisipatif, terlaksananya perbaikan / peningkatan kondisi permukiman dan pelayanan publik yang mengacu pada Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) yang berbasis masyarakat.

C. Struktur Sosial

Struktur sosial merupakan suatu bangunan sosial yang terdiri dari berbagai unsur pembentuk masyarakat (Setiadi dan Kolip, 2011). Koentjaraningrat juga menjelaskan bahwa struktur sosial merupakan kerangka yang dapat menggambarkan kaitan berbagai unsur dalam masyarakat (Setiadi dan Kolip, 2011). Abdulsyani (1994) juga menjelaskan bahwa struktur sosial di dalamnya terdapat hubungan timbal balik yang menjadi tatanan sosial masyarakat sehingga status dan peran membentuk keteraturan perilaku yang nantinya memberi bentuk masyarakat.

Secara garis besar dapat dipahami bahwa struktur sosial merupakan jalinan unsur-unsur pembentuk masyarakat yang berfungsi untuk memberikan keteraturan bentuk masyarakat. Ciri-ciri struktur sosial meliputi (Abdulsyani, 1994):

1. Struktur sosial dapat diartikan hubungan sosial yang nantinya akan memberikan bentuk pada kehidupan sosial sehingga memberikan batasan terhadap aksi-aksi yang dilakukan dalam bentuk organisatoris.
2. Struktur sosial dapat dilihat melalui hubungan antar individu pada periode tertentu.
3. Struktur sosial apabila dipandang dari sudut teoritis merupakan kebudayaan masyarakat.
4. Struktur sosial bersifat statis akibat dari realitas sosial.

5. Struktur sosial merupakan transformasi masyarakat yang terdiri dari perubahan dan perkembangan.

Struktur sosial yang berkembang di masyarakat memiliki fungsi (Hoogvelt dalam Abdulsyani, 1994):

1. Fungsi mempertahankan pola (*pattern maintenance*);
2. Fungsi integrasi;
3. Fungsi pencapaian tujuan (*goal attainment*);
4. Fungsi adaptasi.

Unsur-unsur yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat akan membangun suatu struktur sosial dimana menurut Abdulsyani (1994) menyebutkan terdapat lima unsur sosial yaitu (1) kelompok sosial, (2) kebudayaan, (3) lembaga sosial, (4) stratifikasi sosial, (5) kekuasaan dan wewenang. Sedangkan menurut Setiadi dan Kolip (2011), unsur struktur sosial meliputi (1) status dan peran, (2) institusi (lembaga) sosial, (3) pelapisan sosial (stratifikasi sosial), (4) kelompok sosial, dan (5) dinamika sosial.

1. Lembaga sosial merupakan bagian dari masyarakat yang di dalamnya terkait dengan norma maupun aturan yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari (Setiadi dan Kolip, 2011). Pemahaman tersebut sangat berhubungan dengan pola jaringan antar manusia dan kelompok yang didasarkan pada norma dan aturan yang berfungsi untuk memelihara kepentingan manusia dan kelompoknya.
2. Kelompok sosial merupakan kumpulan orang-orang yang di dalamnya terdapat hubungan dan interaksi sehingga tumbuh perasaan bersama (Abdulsyani, 1994). Kelompok sosial ini biasanya terbentuk karena memiliki sebuah kesamaan dalam hal tertentu.

3. Kekuasaan dan wewenang merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Setiadi dan Kolip (2011) menjelaskan perbedaan pengertian dari keduanya. Kekuasaan merupakan kemampuan dalam menggunakan sumber pengaruh yang dimiliki seseorang maupun kelompok dalam rangka mempengaruhi pihak lain. Sedangkan kewenangan merupakan hak moral yang dimiliki seseorang dengan memperhatikan nilai dan norma masyarakat dalam membuat dan melaksanakan keputusan publik. Keduanya memiliki perbedaan pada legalitas dan hak moral yang dimiliki.
4. Stratifikasi sosial merupakan pengelompokan orang dalam suatu tingkatan secara vertikal baik antar orang maupun kelompok yang tidak sederajat, selain itu dapat dikatakan bahwa stratifikasi sosial merupakan persoalan kesenjangan atau polarisasi sosial (Setiadi dan Kolip, 2011).
5. Kebudayaan merupakan suatu cara hidup yang di dalamnya terkandung nilai dan norma-norma sosial (Abdulsyani, 1994). Kebudayaan ini dikembangkan secara terus menerus sehingga nilai dan norma melekat di dalamnya.
6. Dinamika sosial merupakan telaah yang terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan sosial (Setiadi dan Kolip, 2011). Unsur-unsur perubahan sosial meliputi pengendalian sosial, penyimpangan sosial, mobilitas sosial, dan perubahan sosial.

Beberapa penelitian yang mendukung struktur sosial yang erat kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan disebutkan oleh Heriyanti (2015) yang menyebutkan bahwa masyarakat yang mendiami kawasan

tertentu pasti memiliki sistem sosial yang di dalamnya terdapat struktur sosial tertentu yang disebut status dan peran. Sejalan dengan itu, Pada kasus yang diteliti oleh Mahardika (2015) diketahui bahwa kesadaran diskursif agen akan mengawali sebuah perubahan dengan peranan yang meliputi sosialisasi, pemberian materi, berkompetensi, dan berkoordinasi. Mahardika (2015) juga menyebutkan hubungan antar agen dengan struktur dapat terjadi melalui skema struktur dominasi (penguasaan agen terhadap struktur), berlanjut signifikan (ajakan agen pada struktur), dan mencapai skema legitimasi (pembenaran atas upaya agen oleh struktur). Penelitian yang dilakukan Sotyadarpita (2016) lebih membahas bahwa dalam struktur sosial yang memiliki modal sosial kepercayaan pada daerah terdampak pembangunan memiliki peranan positif terhadap rencana pembangunan karena potensi munculnya permasalahan sosial mampu ditekan bahkan diminimalisir sehingga jalannya proses pembangunan tidak terhambat. Lebih spesifik, Kinseng (2017) menyebutkan bahwa tindakan aktor dipengaruhi oleh struktur berupa struktur sosial dan struktur fisik-material sehingga struktur dibedakan menjadi enam bentuk yang meliputi wacana atau diskursus, aturan-aturan termasuk norma dan adat istiadat, para aktor sosial lain, tidakan para aktor sosial, stratifikasi dan kelompok-kelompok sosial, serta sumberdaya fisik baik alam maupun non alam. Oleh sebab itu, Kinseng (2017) berpendapat bahwa struktur sosial merupakan hasil dari manusia sebagai aktor secara kolektif yang menyebabkan sifat objektif serta relatif otonom apabila dilihat dari sudut pandang masing-masing individu aktor. Lebih spesifik terkait permukiman kumuh, Indriani (2017) dalam

penelitiannya menjelaskan bahwa struktur yang terkait dengan sumber daya maupun aturan sosial dapat menjadi pendorong atau penghalang tindakan dan dengan begitu masyarakat yang berada di kawasan kumuh tetap memiliki peluang dalam strategi bermukimannya terutama dalam peningkatan kualitas ruang hidup dan perubahan cara pandang. Walaupun kelima penelitian tersebut membahas terkait dengan struktur sosial masyarakat namun belum ada yang menjelaskan peran masing-masing unsur struktur sosial terhadap pelaksanaan Program PLPBK Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini juga dijelaskan terkait keadaan struktur sosial masyarakat Kelurahan Karangwaru, kronologi bagaimana masing-masing peran struktur dalam pelaksanaan program, dan unsur yang mendominasi peran dalam pelaksanaan program.

Metode Penelitian

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta yang menjadi kawasan pertama yang mendapat program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) di Kota Yogyakarta yang terbagi atas 5 (lima) rukun kampung yaitu Bangirejo, Blunyahrejo, Karangwaru Kidul, Karangwaru Lor, dan Petinggen. Dimana objek kajian untuk analisa dititipkan pada aktor dalam pelaksanaan program PLPBK di Kelurahan Karangwaru. Alokasi program PLPBK yang masuk di Kelurahan Karangwaru ditekankan pada 6 segmen dimana 4 segmen berada di Sungai Buntung, 1 segmen di Sungai Code, dan 1 segmen lainnya di luar daerah sungai di Kelurahan Karangwaru. Dana program PLPBK Kelurahan Karangwaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Dana Program PLPBK Kelurahan Karangwaru

Segmen	Sumber Dana	Tahun	Jumlah Dana
Segmen 1	BLM (Bantuan Langsung Masyarakat)	2010	Rp. 1.000.000.000,00
Segmen 4	Kemitraan PBL	2013	Rp. 760.000.000,00

Sumber: Data Diolah, 2017

Tabel 2. Chanelling setelah Program PLPBK Kelurahan Karangwaru

Segmen	Sumber Dana	Tahun	Jumlah Dana
Segmen 2	Bangkim PUP-ESDM DIY	2015	Rp. 3.300.000.000,00
Lanjutan Segmen 2	Bangkim PUP-ESDM DIY	2016	Rp. 3.800.000.000,00
Lanjutan Segmen 4	Satker PKP Prov DIY	2017	Rp. 7.673.770.000,00

Sumber: Profil Karangwaru Riverside (2015) dan Hasil Wawancara (2017)

B. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan

deduktif sedangkan metode yang digunakan ialah metode kualitatif dimana Sugiyono (2014) mengatakan bahwa metode ini memiliki dasar filsafat

positivism untuk melihat kondisi obyek yang alamiah dimana instrumen kunci adalah peneliti dengan pengumpulan data triangulasi dan penekanan pada makna daripada generalisasi.

C. Teknik Pengambilan Data dan Sampel Penelitian

Pada penelitian ini data yang digunakan ialah data primer dan sekunder dimana data primer dilakukan dengan observasi lapangan dan wawancara sedangkan data sekunder berasal dari dokumen, peraturan, dan literatur yang diperoleh dari instansi terkait. Data observasi lapangan didapat melalui pengamatan pada lokasi PLPBK di Kelurahan Karangwaru beserta *stakeholders* yang terkait pada program dengan cara foto dan rekaman. Sedangkan wawancara dilakukan dengan wawancara semi terstruktur (*in-dept interview*) agar menemukan permasalahan secara lebih terbuka dari responden wawancara. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan program dimana informan yang berkenaan langsung dengan program PLPBK dipilih dengan menggunakan teknik sampling *non-probability sampling* dengan *purposive sampling*. Jumlah sampel untuk penelitian ini sebanyak 12 orang. Wawancara yang dilakukan pada informan kunci dilakukan untuk pembuktian terhadap indikator amatan yang akan diuji dengan tujuan penelitian peran struktur sosial dalam program PLPBK Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta. Hasil wawancara berdasarkan indikator amatan tersebut dituangkan dalam hasil dan pembahasan yang dibandingkan dengan hasil observasi lapangan serta dokumen terkait PLPBK Kelurahan Karangwaru.

Tabel 3. Daftar Nama Informan Kunci

Nama	Peran
Suhardi, S.IP.	Lurah Karangwaru
Sugito, B.Sc.	Koordinator Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tridaya Waru Mandiri Periode 2012-2014 dan Periode 2015-2017
Asrodiyono, S.T.	Fasilitator Kelurahan Karangwaru
Endang Suwardani	Sekretaris Kelurahan Karangwaru
Enni Pratiwi, S.H.	Sekretariat BKM Tridaya Waru Mandiri
Rihadiyanto	Sekretariat BKM Tridaya Waru Mandiri
Ir. Danantoro	Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Waru Kasih 1 dan Unit Pengelola Lingkungan (UPL) Periode 2015-2017
Setiabudi	Pengurus Komunitas Karangwaru Riverside Bidang Perawatan dan Pemeliharaan
Asfatah Seri	Ketua RT. 4 RW. 2 Kelurahan Karangwaru
Rambat	Ketua Dasawisma RT. 10 RW. 4 Kelurahan Karangwaru
Editya	Satker PKP Povinsi DIY
Yunita Rahmi Hapsari, S.T., M.T.	Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan (Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta)

D. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui peran struktur sosial dalam program PLPBK Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta berdasarkan deduksi teori yang telah dikaji.

Tabel 4. Variabel Penelitian

Variabel	Dimensi Variabel	Indikator	Indikator Amatan	Metode Analisis Data	
Peran Struktur Sosial	Lembaga masyarakat	Jaringan lembaga kemasyarakatan	Hubungan antar lembaga Hubungan dengan masyarakat Hubungan dengan pihak luar	Deskriptif Kualitatif	
		Norma dan aturan lembaga kemasyarakatan	Bentuk norma dan aturan lembaga Manfaat norma dan aturan Bentuk sanksi sebagai <i>social control</i>		
		Kelompok masyarakat	Interaksi		Interaksi dalam kelompok Interaksi dengan kelompok lain
			Komunikasi		Penyebaran informasi
		Kekuasaan dan wewenang	Kekuasaan		Tujuan dari kekuasaan Cara penggunaan sumber-sumber pengaruh Hasil penggunaan sumber-sumber pengaruh
					Wewenang
	Stratifikasi sosial		Posisi (status sosial)		Kedudukan individu dalam masyarakat
	Kebudayaan	Nilai	Cita-cita dan ketentuan-ketentuan		
		Norma	Kebiasaan hidup Adat istiadat atau adat kebiasaan (<i>folkway</i>)		
	Dinamika sosial	Pengendalian sosial	Cara pengawasan Proses pengawasan		
		Penyimpangan sosial	Bentuk penyimpangan perilaku Reaksi masyarakat		
		Mobilitas sosial	Perubahan status Perubahan peranan		
		Perubahan sosial	Pergeseran pola-pola kehidupan		

Sumber: Kajian Penulis, 2017

E. Metode Analisis Data Penelitian

Data yang telah dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data baik primer dan sekunder yaitu dokumen terkait, wawancara, dan observasi lapangan dibandingkan dengan seksama

menggunakan teknik triangulasi untuk validitas data. Validitas data digunakan agar data-data yang kita gunakan terbukti kebenarannya sehingga mampu menjadi bahan pembuktian dari penelitian. Data-data yang telah ada dikombinasikan dan

direduksi sehingga didapat kesimpulan dari telaah yang dilakukan.

Hasil Penelitian

A. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga masyarakat yang berkontribusi dalam program PLPBK di Kelurahan Karangwaru berbentuk institusi dimana institusi-institusi tersebut terbentuk sebelum program PLPBK ada. Kontribusi lembaga sosial dilihat melalui jaringan lembaga kemasyarakatan yang terbentuk disertai dengan norma dan aturan lembaga.

1. Jaringan lembaga kemasyarakatan

Lembaga yang berkaitan langsung dalam program PLPBK di Kelurahan Karangwaru ialah pemerintah Kelurahan Karangwaru, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tridaya Waru Mandiri, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Ketiga lembaga tersebut menjadi pilar dalam pembangunan di Kelurahan Karangwaru dan memiliki hubungan sangat baik. Hal tersebut dikarenakan sudah terbentuk sistem koordinasi terhadap pembagian tugas dan tanggung jawab sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Dalam program PLPBK, BKM Tridaya Waru Mandiri memegang tanggung jawab sebagai lembaga independen. BKM selalu menerapkan koordinasi dengan LPMK terkait dengan pembangunan fisik kelurahan. Tripilar ini berkoordinasi melalui rapat untuk mengatur agenda pelaksanaan program PLPBK. Struktur BKM yang telah mandiri menjadi salah satu faktor utama karena UPS (Unit Pengelola pembangunan Sosial), UPK (Unit Pengelola Keuangan), dan UPL (Unit Pengelola Lingkungan) telah terbentuk. Dalam proses pelaksanaan program PLPBK pembentukan TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif), TIP (Tim

Inti Pemasaran), TAPP (Tenaga Ahli Pendamping Perencanaan) serta pokja-pokja terbentuk dengan baik dan berkontribusi sesuai dengan tugas yang telah dibebankan. Hal tersebut dapat terselenggara dengan baik karena BKM rutin melakukan rapat sebulan sekali dan khusus untuk program PLPBK diadakan pertemuan maupun sosialisasi sesuai dengan rencana kegiatan program. Kerjasama BKM yang kuat menyebabkan hubungan intern maupun ekstern terjalin dengan baik. Kerjasama lembaga sosial juga dikembangkan dengan kerjasama bersama kelompok sosial dimana koordinasi dan kerjasama awal dilakukan pada tahapan perencanaan partisipatif guna menghasilkan perencanaan yang sesuai serta tumbuhnya even-even yang dilaksanakan di Kelurahan Karangwaru. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari fungsi pemerintah kelurahan yang memberikan informasi terkait administrasi tanah dan bangunan masyarakat.

Hubungan lembaga sosial dengan masyarakat terjalin dengan baik dengan menjadi rekan dalam setiap even maupun acara. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya gap diantara unsur sosial di dalam masyarakat karena BKM memang bertugas dalam memfasilitasi masyarakat. Program PLPBK membuat hubungan lembaga sosial BKM, LPMK, dan pemerintah Kelurahan Karangwaru sangat erat karena peran utama dari program ini adalah masyarakat. Selalu berada di posisi yang sama dengan masyarakat menyebabkan antara lembaga masyarakat dan masyarakat memiliki kerjasama yang baik terutama dalam mewujudkan keinginan bersama. Menggerakkan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk memunculkan aktor-aktor pendukung yang berasal dari masyarakat

yang menjadi tim inti dimana pembentukannya dilakukan oleh BKM dan pemantauannya dilakukan oleh pemerintah kelurahan. Masyarakat sebagai aktor utama memang difasilitasi untuk menyampaikan aspirasi yang nantinya ditampung aspirasinya oleh BKM beserta tim inti. Pada prakteknya, BKM yang terdiri dari UPS, UPK, dan UPL serta tim inti senantiasa memberikan pelayanan terhadap masyarakat agar masyarakat paham sepenuhnya dalam pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan pembangunan fisik juga terbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang terdiri dari KSM Waru Kasih 1, 2, 3, 4 dan 5 yang terjun langsung di lapangan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan fisik.

Hubungan lembaga masyarakat di Kelurahan Karangwaru terjalin baik dengan pihak luar sejak program PLPBK ini dicanangkan. Hal ini juga didukung kinerja BKM dimana menjadi acuan untuk mendapatkan program karena sudah mandiri baik di tingkat provinsi maupun nasional. Kerjasama BKM dengan pemerintah pusat dimulai dari tahap awal program hingga keberlanjutannya dimana dukungan dari pemerintah kelurahan selaku yang bertanggung jawab secara administrasi dan melaporkan capaian kegiatan pada pemerintah pusat. Salah satu hubungan yang dilakukan ialah pada proses pemasaran kawasan prioritas melalui kemitraan. BKM dan masyarakat juga mencoba sektor swasta dalam penggalangan dan untuk melanjutkan pembangunan yang ada di kawasan bantaran sungai mereka melakukan promosi dikarenakan masyarakat tidak memiliki dana yang cukup besar dalam pembangunan dan pemeliharaan. Usaha yang dilakukan oleh lembaga BKM beserta masyarakat yaitu melalui pemerintah

(Dirjen Kementerian PU), CSR (*Corporate Social Responsibility*) ke perusahaan cat propan, lembaga pendidikan (universitas), dan perusahaan yang terletak di wilayah Karangwaru yaitu Kobota.

2. Norma dan aturan lembaga kemasyarakatan

BKM belum memiliki norma dan aturan secara resmi namun dengan adanya program PLPBK yang masuk pada kelurahan mereka, maka terbentuk aturan bersama yang disepakati agar pelaksanaan program sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Aturan bersama ini merupakan aturan tertulis yang telah dirumuskan melalui tahapan perencanaan partisipatif dimana memang dibentuk oleh seluruh *stakeholders* yaitu masyarakat, lembaga sosial, kelompok sosial, dan pemerintah daerah. Aturan bersama yang telah terbentuk dan telah disepakati diumumkan kepada masyarakat melalui sosialisasi sehingga masyarakat mengerti dan memahami terhadap apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dalam membenahi lingkungan permukimannya. Masyarakat Kelurahan Karangwaru secara bertahap telah mengaplikasikan aturan bersama yang mereka sepakati. Walaupun tidak secara langsung namun aturan bersama ini masih dipegang oleh masyarakat sampai saat ini. Adanya aturan bersama tidak serta merta mengalami kelancaran namun juga terdapat kendala yang dialami. Aturan bersama yang telah diterapkan di Kelurahan Karangwaru tidak memiliki sanksi sehingga jika terjadi pelanggaran maka tidak ada hukuman karena mereka menganggap bahwa yang dipentingkan dalam aturan bersama ini ialah kerelaan dan kebersamaan sehingga tidak ada paksaan atau hukuman. Namun karena kehidupan bermasyarakat masih erat maka

sanksi yang diterapkan bersifat informal dengan pendekatan terhadap masyarakat dan sanksi sosial berupa pengucilan.

B. Kelompok Sosial

Kelompok sosial yang terjun langsung dalam program PLPBK di Kelurahan Karangwaru yaitu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karangtaruna, kelompok kesenian, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan komunitas Karangwaru Riverside. Kelompok sosial seperti PKK, karangtaruna, dan kelompok kesenian sudah ada sebelum program PLPBK masuk sedangkan KSM dan komunitas Karangwaru Riverside ada pada saat program berlangsung dan program berakhir.

1. Interaksi

Kelompok PKK merupakan kelompok yang terbentuk karena adanya kesamaan gender dimana fokus pembentukannya ialah pemberdayaan wanita agar ikut dalam pembangunan. Interaksi internal melalui arisan maupun pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui peningkatan ketrampilan dalam hal ekonomi. PKK berperan dalam penentuan pengambilan keputusan dimana juga masuk dalam tim inti yaitu TIPP (Tim Inti Perencanaan Partisipatif). PKK berkontribusi untuk memberikan ide terkait efek program PLPBK terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mendukung even-even untuk ekonomi kreatif dalam setiap acara pada Kelurahan Karangwaru. Ibu-ibu PKK ini biasanya menjual barang-barang seperti souvenir dan makanan pada setiap even.

Karangtaruna merupakan kelompok dengan basis remaja. Peran karangtaruna dalam program PLPBK ialah membantu

dalam meningkatkan peran remaja terutama dalam even-even yang berhubungan dengan kesenian. Peran dari karangtaruna semakin meningkat setelah adanya program PLPBK dimana kelompok sosial ini ikut serta dalam pengambilan keputusan pada tahap perencanaan partisipatif, tim inti, dan juga aksi perlindungan terhadap keberlanjutan lingkungan. Hal tersebut tercermin dari pemeliharaan lingkungan dengan bersih-bersih, kesenian, bank sampah yang berlanjut hingga saat ini. Dapat dikatakan bahwa peran karangtaruna Kelurahan Karangwaru lebih pada upaya pengendalian lingkungan terutama pengelolaan dan pemeliharaan hasil program.

Kelompok kesenian di Kelurahan Karangwaru merupakan perkumpulan masyarakat Kelurahan Karangwaru yang senang dalam melestarikan budaya yaitu musik dan tari Jawa seperti karawitan dan jatilan. Perkembangan kelompok kesenian di Kelurahan Karangwaru semakin meningkat setelah adanya program PLPBK karena setelah program PLPBK even-even semakin meningkat dan tersedianya media berupa ruang terbuka yang digunakan untuk menampilkan kesenian yang mereka kembangkan. Ide ruang terbuka terakomodir saat kelompok kesenian mengikuti perencanaan partisipatif.

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di Kelurahan Karangwaru terbentuk saat pelaksanaan pembangunan fisik pada program PLPBK. KSM ini berfungsi untuk mengkoordinasikan pembangunan fisik dalam penataan kawasan terutama dalam pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan. KSM berasal dari masyarakat Kelurahan Karangwaru sendiri sehingga transparansi kinerja dalam semua aspek dapat mengurangi kecurigaan

terhadap satu sama lain karena masyarakat sendiri yang mengelolanya. Hal tersebut juga berjalan lancar karena KSM juga bertugas sendiri dalam membuat laporan terkait kegiatan dan rencana anggaran biaya untuk pembangunan fisik.

Komunitas Karangwaru Riverside mulai berdiri pada tahun 2015 setelah program PLPBK berakhir. Komunitas ini terbentuk karena terhentinya atau gagalnya pembentukan lembaga operasional dan pemeliharaan. Komunitas ini terbentuk dari ide beberapa masyarakat yang sebagian merupakan pimpinan kolektif di BKM. Komunitas ini terbuka untuk seluruh masyarakat Kelurahan Karangwaru. Akibat terbentuknya komunitas ini maka muncul relawan-relawan peduli baru yang ikut menjaga keberlanjutan program PLPBK. Komunitas ini menggerakkan masyarakat melalui even-even yang diadakan setiap minggu untuk menjaga semangat dan bentuk sosialisasi kreatif dalam melestarikan kawasan terbangun di Kelurahan Karangwaru. Komunitas ini memiliki fokus pada pemeliharaan dan operasional, *channelling* program, dan program berbasis komunitas.

Interaksi antar kelompok sosial di Kelurahan Karangwaru terjadi pada saat perencanaan partisipatif dan adanya even-even yang diadakan di Kelurahan Karangwaru. Sebelum adanya program PLPBK interaksi antar kelompok sangat jarang dikarenakan tidak adanya pertemuan bersama. Namun dengan adanya program PLPBK mereka berkerjasama dan terlibat langsung secara bersama-sama dalam menentukan nasib lingkungan mereka dan menjaga keberlanjutan pembangunan fisik yang dilakukan.

2. Komunikasi

Komunikasi di dalam maupun antar kelompok sosial digunakan sebagai media penyebaran informasi. Penyebaran informasi yang mereka lakukan secara rutin ialah pertemuan yang dilakukan minimal satu bulan terkait agenda kegiatan yang akan dilakukan. Media penyebaran informasi lain yang biasa digunakan kelompok sosial di Kelurahan Karangwaru ialah undangan, media pamphlet (papan informasi), sosial media, even-even, dan dari mulut kemulut. Undangan digunakan untuk penyebaran informasi untuk kegiatan yang bersifat formal. Media pamflet (papan informasi) digunakan untuk penyampaian informasi dan agenda-agenda rutin yang biasanya dilakukan dalam skala kelurahan Karangwaru. Media sosial seperti *facebook*, *instagram*, dan *blog*. merupakan akses termudah masyarakat dalam media informasi bagi kegiatan dan hasil pelaksanaan pembangunan. Even-even yang dilakukan bersama sebagai media informasi yang digunakan untuk pemberitahuan kepada masyarakat maupun antar kelompok. Penyebaran informasi dari mulut ke mulut digunakan karena terdapat sekelompok orang yang memiliki lebih dari satu kelompok dalam bermasyarakat sehingga apabila dirinya mendapat informasi dari keikutsertaanya di kelompok tertentu maka dia juga akan memberikan informasi tersebut kepada kelompok lain yang diikuti. Komunikasi antar kelompok sosial masyarakat di Kelurahan Karangwaru berjalan lancar karena masyarakat masih memegang teguh prinsip guyub. Media elektronik seperti siaran radio digunakan untuk mempromosikan wilayah. Even-even yang ada termasuk minggu guyub juga dilakukan untuk menjaga kekompakan kelompok sosial agar tetap berpartisipasi dalam pasca program PLPBK.

C. Kekuasaan dan Wewenang

Pelimpahan kekuasaan dan wewenang untuk program PLPBK di Kelurahan Karangwaru yaitu dari Direktorat Kementerian Pekerjaan Umum kepada BKM Tridaya Waru Mandiri selaku lembaga independen yang menerima secara langsung program.

1. Kekuasaan

Kekuasaan program PLPBK di Kelurahan Karangwaru mutlak dimiliki oleh BKM Tridaya Waru Mandiri. Kekuasaan yang dipegang ini merupakan kekuasaan yang bertujuan untuk merangkul masyarakat dalam mencapai tujuan program PLPBK Kelurahan Karangwaru bukan untuk menguasai pihak lain. Kekuasaan ini mendapat dukungan penuh oleh masyarakat karena pada dasarnya pemilihan keanggotaan lembaga BKM berasal dari masyarakat dari tingkat RT sampai tingkat kelurahan dan yang dipilihpun memang masyarakat Kelurahan Karangwaru sendiri sehingga kepercayaan terhadap tokoh-tokoh di dalamnya juga dipercaya oleh masyarakat.

Tujuan dari kekuasaan yang diemban oleh BKM Tridaya Waru Mandiri adalah untuk mewujudkan lingkungan permukiman yang nyaman huni. Misi yang dilakukan ialah peningkatan sarana prasarana; permukiman yang hijau, asri produktif, pola hidup sehat, masyarakat yang tertib dan sadar hukum; dan mengembangkan perekonomian dan penanggulangan kemiskinan. Visi misi ini sangat didukung penuh melalui adanya program PLPBK karena kesamaan diantara keduanya yaitu pembenahan lingkungan permukiman kumuh. Kekuasaan yang diemban BKM Tridaya Waru Mandiri sepenuhnya digunakan untuk mengajak secara penuh dalam semua tahapan dan keberlanjutan program PLPBK sesuai

dengan potensi dan masalah yang mereka alami. Yang menjadi dasar ialah kesamaan cita-cita dari masyarakat, BKM Tridaya Waru Mandiri, dan program PLPBK sehingga kerjasama *stakeholders* berjalan dengan baik.

Penggunaan sumber-sumber pengaruh BKM telah mengubah pola pikir masyarakat di Kelurahan Karangwaru walaupun tidak secara langsung namun secara perlahan kian meningkat. Dukungan masyarakat juga bertambah seiring dengan hasil dari pembangunan fisik melalui program PLPBK sehingga yang awalnya acuh menjadi sadar bahwa perencanaan yang dilakukan untuk mereka. Walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam proses pelaksanaan namun pada umumnya masyarakat sangat antusias sehingga hasil program PLPBK dimanfaatkan dengan baik. Pendekatan persuasif digunakan oleh masyarakat di Kelurahan Karangwaru sehingga secara bersama-sama merubah pola pikir masyarakat yang dulunya kurang terbuka kian hari kian sadar untuk ikut serta dalam setiap tahapan program.

2. Wewenang

Wewenang program PLPBK di Kelurahan Karangwaru dipegang oleh BKM Tridaya Waru Mandiri. Namun sistem pada Kelurahan Karangwaru, wewenang dilakukan pembagian melalui kerjasama dari tingkat paling rendah yaitu Rukun Tetangga (RT) dan paling tinggi kelurahan. Wewenang ini dilakukan agar menyentuh semua pihak dalam kehidupan bermasyarakat sehingga keberlanjutan program bisa diterapkan dan apabila masyarakat memerlukan bantuan maupun ingin mengutarakan permasalahan maka akan terjalin komunikasi yang baik karena sudah adanya kepercayaan.

Hak moral yang diemban oleh BKM Tridaya Waru Mandiri disesuaikan

dengan pedoman pelaksanaan program PLPBK tahun 2010 sehingga masyarakat telah mengerti peran dan tugas untuk mewujudkan tujuan program PLPBK. Hak moral yang ada di Kelurahan Karangwaru disalurkan secara horizontal maupun vertikal kepada masyarakat sehingga harmonisasi tata pelaksanaan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kinerja BKM Tridaya Waru Mandiri juga diimbangi dengan tim inti yang masuk dalam kepanitiaan program PLPBK. Fokus keduanya ialah mengajak dan mendorong masyarakat ikut serta dalam program. Kompetensi masing-masing tim juga ditingkatkan melalui penguatan tim inti agar peran dan fungsi berjalan baik dalam melayani masyarakat. Hak moral yang melekat pada BKM telah dicapai jauh sebelum program PLPBK ada karena program PLPBK yang ada didapat jika BKM telah mandiri sehingga kompetensi dari BKM Tridaya Waru Mandiri sudah tidak diragukan lagi. Wewenang yang ada berperan mempermudah distribusi tugas pada setiap unsur masyarakat.

D. Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial program PLPBK Kelurahan Karangwaru dapat dibedakan berdasarkan aspek ekonomi (miskin/rentan dan mampu), gender (laki-laki dan perempuan), geografis (daerah bantaran sungai dan luar bantaran sungai), serta fisik kawasan (sisi timur dan barat sungai), dan keahlian/kemampuan.

1. Posisi atau status sosial

Apabila dilihat dari sisi ekonomi maka masyarakat di Kelurahan Karangwaru dibedakan menjadi masyarakat miskin/rentan dan masyarakat mampu dimana masyarakat miskin/rentan cenderung bermukim di daerah bantaran Sungai Code dan Sungai Buntung yang mengakibatkan mereka mengalami

keterbatasan akses terhadap sarana prasarana sehingga lingkungan yang mereka huni menjadi kumuh. Dilihat dari aspek gender maka pada program PLPBK di Kelurahan Karangwaru sangat memperhatikan aspirasi dari wanita walaupun pada awalnya masih didorong namun semangat dari perempuan di Kelurahan Karangwaru sangat berperan besar pada setiap kegiatan. Walaupun ada sebutan bahwa perempuan merupakan “kaca wingking” atau kaca belakang namun kemauan perempuan tetap diperhatikan. Program PLPBK di Kelurahan Karangwaru merupakan program yang merangkul semua kalangan masyarakat sehingga tidak membedakan masyarakat yang tinggal di dalam atau di luar kawasan bantaran sungai.

Stratifikasi sosial masyarakat di Kelurahan Karangwaru tidak melemahkan program PLPBK melainkan memperkuat keputusan dalam penyelesaian masalah bersama walaupun terdapat perbedaan pendapat dan pandangan dipecahkan melalui pendekatan persuasif. Pada tahapan pembangunan fisik, semua masyarakat dalam status yang berbeda diikutkan untuk saling melengkapi keahlian dalam pembangunan sarana prasarana. Beberapa kawasan di Kelurahan Karangwaru dipisahkan oleh sungai, salah satunya ialah Sungai Buntung. Hal tersebut menyebabkan gap atau anggapan bahwa masyarakat timur dan barat sungai itu berbeda. Program PLPBK membantu mengatasi masalah tersebut dengan bekerjasama dalam pelaksanaan program tanpa memandang status sosial. Selanjutnya hasil pembangunan jembatan dan jalan inspeksi menyebabkan kedua kawasan terhubung dan gap hilang sebab masyarakat lebih sering bersosialisasi. Stratifikasi sosial yang terjadi akan luntur

jika masyarakat memiliki tujuan dan keinginan yang sama dalam mendukung program PLPBK di Kelurahan Karangwaru.

E. Kebudayaan

Kebudayaan sangat penting bagi pembangunan suatu kawasan. Budaya yang dilestarikan pada Kelurahan Karangwaru identik dengan budaya jawa karena berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1. Nilai-nilai Sosial

Nilai sosial yang berkembang ditunjukkan dengan cita-cita masyarakat Kelurahan Karangwaru dimana menginginkan lingkungan yang layak dan nyaman huni. Cita-cita sebenarnya sudah dinaungi oleh BKM Tridaya Waru Mandiri sebelum adanya program PLPBK namun karena ketidakmampuan masyarakat dalam memecahkan masalah tersebut terutama biaya dan kesadaran masyarakat membuat cita-cita tersebut menjadi angan-angan. Cita-cita tersebut memperoleh harapan ketika program PLPBK masuk karena dana dan kesempatan untuk mewujudkan semuanya dengan kerjasama. Hal itu juga didukung pengetahuan masyarakat yang telah mengetahui filosofi dimana bahwa kawasan sungai identik dengan kekumuhan sehingga harus ditangani terlebih dahulu.

Cita-cita membentuk masyarakat menjadi lebih kreatif dan inisiatif untuk mempertahankan hasil dari cita-cita yang diraih. Pedoman hidup masyarakat Kelurahan Karangwaru tercermin untuk meningkatkan permukiman yang layak huni dapat dilihat melalui aspirasi masyarakat dalam mengemukakan masalah lingkungannya, gotong royong pada pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fisik lingkungan dengan pemanfaatan sarana prasarana melalui even-even rutin.

2. Norma-norma sosial

Kebiasaan masyarakat yang dulu tidak memperhatikan lingkungan terhapuskan dengan cita-cita dan aturan bersama yang mereka buat. Kebiasaan yang acuh terhadap lingkungan semakin lama berkurang karena adanya program PLPBK dimana kesadaran dan kebiasaan baru masyarakat mulai meningkat dalam menjaga dan mempertahankan lingkungan.

Kelurahan Karangwaru yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta sangat dipengaruhi oleh kesenian budaya jawa. Di Kelurahan Karangwaru dilestarikan kesenian jawa yang meliputi tari (jatilan) dan musik instrumen jawa (karawitan). Budaya yang terlestarikan sebelum adanya program PLPBK menjadi identitas lokal dimana mempengaruhi keputusan mulai dari dokumen, sarana prasarana, dan pola pemanfaatan sehingga program PLPBK mengakomodir ruang untuk penampilan kesenian sehingga kelompok kesenian berkembang.

F. Dinamika Sosial

Unsur sosial dalam masyarakat bisa mengalami perubahan yang signifikan atau tidak sama sekali mengalami perubahan akibat masuknya program PLPBK. Dinamika sosial ini terjadi di dalam aspek pengendalian sosial, penyimpangan sosial, mobilitas sosial, dan perubahan sosial.

1. Pengendalian sosial

Pengendalian sosial dilakukan agar masyarakat mau untuk memahami dan melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati bersama-sama. Pengendalian sosial ini sangat sulit untuk dilakukan karena jika bersifat memaksa tidak akan berjalan dengan efektif. Program PLPBK merupakan salah satu jalan untuk pengendalian sosial yang berhubungan dengan lingkungan. Beberapa cara yang digunakan dalam pengendalian sosial ialah cara formal dan informal dimana

digunakan untuk memberikan batasan-batasan terhadap perilaku masyarakat dalam pelaksanaan program PLPBK. Pengendalian sosial sudah diterapkan sejak awal program dimana masyarakat mendatangi surat komitmen dan pernyataan untuk ikut serta dalam program PLPBK sampai saat ini. Pengendalian sosial lainnya melalui pamflet (papan informasi) dan aturan bersama yang mereka sepakati. Pengendalian informal dilakukan melalui pendekatan persuasif dengan mendatangi rumah-rumah yang tidak menaati aturan bersama dan kemudian akan dibahas pada pertemuan RT untuk dipikirkan langkah penyelesaiannya. Pengendalian yang sangat ampuh berkembang di Kelurahan Karangwaru yaitu sanksi psikologis. Pengendalian sosial juga mengalami kemajuan dengan munculnya Komunitas Karangwaru Riverside dimana terdapat media untuk mengingatkan masyarakat terhadap tujuan dari program PLPBK. Proses pengawasan tetap dilakukan hingga saat ini melalui rapat-rapat dan sosialisasi serta berkembang dalam bentuk even-even. Rapat yang dilakukan oleh setiap Rukun Tetangga (RT) digunakan untuk pembahasan terkait permasalahan dan pendanaan yang setelahnya disampaikan kepada seluruh masyarakat. Sosialisasi media tetap mengajak warga dalam memelihara keberlanjutan sampai saat ini.

2. Penyimpangan sosial

Penyimpangan sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat terkadang bisa menghasilkan konflik sosial. Sebelum adanya program PLPBK masih banyaknya permasalahan sosial yang terjadi terutama terhadap kepedulian masyarakat yaitu membuang sampah dan Buang Air Besar (BAB) di sungai menyebabkan kekumuhan dan menjadi sumber penyakit. Setelah

adanya program PLPBK tentunya penyimpangan semakin berkurang walaupun tidak hilang semuanya. Pada saat program PLPBK berjalan terdapat penyimpangan sosial yang terjadi yaitu terkendalanya pembebasan lahan, kecurigaan masyarakat terhadap BKM, dan belum sadarnya masyarakat terhadap pemeliharaan lingkungan.

Berbagai reaksi timbul akibat penyimpangan tersebut yang sifatnya positif dan negatif. Reaksi yang timbul akibat kesadaran masyarakat yang kurang menjaga pemeliharaan pembangunan fisik yaitu tumbuhnya komunitas Karangwaru Riverside untuk menjaga keberlanjutan pembangunan fisik. Sedangkan reaksi yang sifatnya negatif ialah pengucilan masyarakat terhadap pihak yang menyimpang. Penyimpangan sosial yang terjadi pada program PLPBK berperan agar masyarakat memahami baik buruknya perilaku yang membawa perubahan sosial masyarakat yaitu timbulnya kesadaran terhadap lingkungan.

3. Mobilitas sosial

Perubahan sosial yang terjadi setelah adanya program PLPBK di Kelurahan Karangwaru berhubungan dengan status dan peran yang terjadi di masyarakat. Basis dari program PLPBK ialah perubahan pola dan perilaku masyarakat. Perpindahan status masyarakat di Kelurahan Karangwaru yaitu perubahan status masyarakat yang tinggal di bantaran sungai yang kumuh menjadi masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran sungai dengan layak huni karena tersedianya sarana prasarana yang memadai. Dampak dari perubahan status menyebabkan hilangnya keterisolasi masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh menjadi hilang sehingga memiliki akses dalam berinteraksi sosial dengan masyarakat

lainnya. Hal tersebut juga menyebabkan status golongan rentan, masyarakat miskin, dan perempuan lebih berdaya dalam peningkatan kualitas lingkungan.

Perubahan peran juga terjadi di dalam masyarakat Kelurahan Karangwaru dimana semua lapisan masyarakat yang merupakan pelaksana dari setiap kegiatan sangat berperan di dalamnya. Masyarakat yang dahulu memiliki partisipasi yang rendah secara perlahan cenderung meningkat partisipasinya. Salah satu hal yang dipetik dalam pelaksanaan program PLPBK di Kelurahan Karangwaru ialah dimana terjadi penentuan nasib secara bersama-sama melalui partisipasi. Perubahan peran yang ada di Kelurahan Karangwaru memang akibat dorongan masyarakat, lembaga, dan kelompok sosial di Kelurahan Karangwaru. Setelah program PLPBK selesai segala pemeliharaan dilakukan oleh masyarakat sendiri sehingga dapat dilihat bahwa masih terjaganya dan berfungsi sarana prasarana.

4. Perubahan sosial

Transformasi masyarakat di Kelurahan Karangwaru dari awal hingga pasca pelaksanaan program PLPBK sangat banyak. Transformasi pertama, jaringan lembaga terhadap lembaga lain, masyarakat, dan pihak luar semakin berkembang dan kuat. Pembagian wewenang satu sama lain antara tripilar yaitu pemerintah kelurahan, BKM, dan LPMK berjalan terkoordinasi. Hubungan dengan masyarakat berjalan dengan tidak adanya gap sehingga menjadi posisi sejajar yang bekerja bersama-sama. Selanjutnya kerjasama dengan pihak luar dibuktikan dengan kerjasama BKM dan relawan peduli yang selalu berusaha meningkatkan kerjasama dengan pemerintah pusat dan daerah, perusahaan, dan lembaga pendidikan. Beberapa gerakan juga tumbuh

yaitu “Gerakan Karangwaru Bersama” yang berfungsi sebagai sarana penggalangan dana. Dimana pada semua prosesnya juga tumbuh aturan bersama yang menjadi acuan masyarakat dalam melakukan tindakan. Transformasi kedua, kelompok sosial berubah menjadi aktor-aktor penting dalam masyarakat. Kelompok sosial yang ada seperti PKK, karangtaruna, kelompok kesenian, KSM, dan komunitas Karangwaru Riverside. Dengan ikutnya masyarakat dari segala macam usia dan strata dalam berpartisipasi maka aspirasi masyarakat dalam segala golongan diperhitungkan. Media komunikasi diantara kelompok sosial dalam penyebaran informasi melalui undangan, media pamflet (papan informasi), media sosial, even-even, dan dari mulut kemulut. Transformasi ketiga, perubahan kekuasaan dan wewenang dimana BKM Tridaya Waru Mandiri yang memiliki tanggung jawab terhadap program PLPBK. Namun secara bertahap tanggung jawab penuh dikembalikan terhadap masyarakat. Dalam pengaplikasian masyarakat tetap didampingi pemerintah kelurahan, lembaga, dan kelompok sosial dalam menjaga keberlanjutan kawasan. Keempat, perubahan stratifikasi penduduk yang berkaitan dengan masyarakat miskin dan rentan serta perempuan yang ikut serta dalam setiap tahapan program dan berlaku sebagai pengambil keputusan pada setiap pembangunan. Perubahan stratifikasi juga terjadi pada status masyarakat dimana masyarakat yang tinggal di daerah bantaran sungai tidak lagi dikategorikan sebagai masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh melainkan masyarakat yang tinggal di kawasan layak huni. Gap yang terjadi diantara masyarakat yang tinggal di kawasan barat dan timur sungai juga

memudar akibat adanya pembangunan jalan inspeksi dan jembatan. Transformasi keempat, munculnya antusiasme kelompok-kelompok kesenian yang melestarikan kesenian Jawa karena terfasilitasinya ruang dan even.

Pembahasan

Struktur sosial dalam program PLPBK Kelurahan Karangwaru memiliki dua peran yaitu peran positif dan peran negatif dimana 4 unsur memiliki peran positif yaitu lembaga sosial, kelompok sosial, kekuasaan dan wewenang, serta kebudayaan sedangkan 2 unsur memiliki peran positif dan peran negatif yaitu stratifikasi sosial dan dinamika sosial.

Tabel 5. Peran Struktur Sosial pada Program PLPBK Kelurahan Karangwaru

Struktur Sosial	Peran	Keterangan
Lembaga Sosial	Positif	Telah terjalinnya kerjasama dan koordinasi yang kuat dalam mendukung program diimbangi dengan pengorganisasian untuk pembangunan berorientasi masyarakat.
Kelompok Sosial		
Kekuasaan dan wewenang	Positif	BKM Tridaya Waru Mandiri yang memegang tanggung jawab penuh terhadap program bekerja dengan sangat baik sebagai perwakilan masyarakat sehingga masyarakat tidak segan dalam menjalin kerjasama dengan lembaga tersebut.
Kebudayaan	Positif	Masyarakat sudah memiliki cita-cita yang sama dengan program PLPBK yaitu menciptakan lingkungan yang nyaman huni yang diimbangi dengan nilai solidaritas sosial diantara masyarakat.
Stratifikasi sosial	Positif dan negatif	Walaupun stratifikasi sosial akan membentuk kesepakatan bersama antar masyarakat namun juga terjadi konflik sosial karena perbedaan pendapat dan pandangan terhadap rencana yang mereka butuhkan.
Dinamika sosial	Positif dan negatif	Transformasi sosial masyarakat mengarah kearah positif namun adanya penyimpangan sosial yang menjadi penghalang dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana prasarana.

Sumber: Kajian Penulis, 2018

Kontribusi terbesar dari unsur struktur sosial dalam program PLPBK Kelurahan Karangwaru mengarah pada lembaga sosial yang berperan penuh dari awal hingga keberlanjutan program. Peran yang dilakukan lembaga sosial dengan menjalin hubungan antar lembaga sosial, lembaga sosial dengan pihak luar, dan lembaga sosial dengan masyarakat pada program PLPBK Kelurahan Karangwaru menggambarkan struktur hierarki formal maupun informal dimana menurut Korten

dan Klauss (1984) menyebutkan bahwa jaringan pada struktur hierarki formal maupun informal bukanlah pengganti satu sama lain namun lebih pada melengkapi sehingga memperkuat jaringan sosial sebagai sumber dukungan, inovasi, dan tindakan sosial. Struktur sosial yang ada di Kelurahan Karangwaru juga sudah memperlihatkan fungsi dari struktur sosial, dimana menurut Hoogvelt dalam Abdulsyani (1994) memiliki (1) fungsi mempertahankan pola dimana unsur-unsur

struktur sosial di Kelurahan Karangwaru sudah terhubung satu sama lain dalam program PLPBK, (2) Fungsi integrasi dimana koordinasi yang dilakukan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Tridaya Waru Mandiri dari tingkat teratas pemerintah pusat hingga tingkat RT dalam program PLPBK. (3) Fungsi pencapaian tujuan dimana semua unsur masyarakat memiliki tujuan sama dalam program PLPBK dan hal tersebut menjadi pedoman dalam setiap pengambilan keputusan dalam kehidupan masyarakat. (4) fungsi adaptasi dimana masyarakat menyesuaikan diri dengan program yang merubah kehidupan masyarakat dari yang tinggal di kawasan kumuh menjadi tinggal di kawasan yang layak huni dengan norma berupa aturan bersama guna keberlanjutan lingkungan.

Struktur sosial Kelurahan Karangwaru sudah terjalin dengan baik dalam menunjang program PLPBK. Hubungan yang baik antar unsur masyarakat membuat masyarakat memiliki rasa kepemilikan terhadap program dan masyarakat belajar menjadi aktor utama dalam mengelola program PLPBK sehingga muncul *self-organization* seperti yang diungkapkan Korten dan Klauss (1984) yang akan membentuk nilai-nilai manusia dalam pengambilan keputusan dimana proses pengembangannya dilakukan dengan konsep dan metode pembelajaran sosial.

Daftar Referensi

- Abdulsyani. (1994). *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen PU. (2010). *Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (Community Based Neighborhood Development): Pedoman Pelaksanaan*. Jakarta: Direktorat Jendral Ciptakarya Departemen Pekerjaan Umum.
- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta. (2014). *Profil Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Kota*

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur sosial yang ada di Kelurahan Karangwaru berperan positif dan berperan negatif dalam menunjang pelaksanaan program PLPBK Kelurahan Karangwaru. Peran positif ditunjukkan oleh unsur lembaga sosial, kelompok sosial, kekuasaan dan wewenang, serta kebudayaan yang ada di Kelurahan Karangwaru. Sedangkan stratifikasi sosial dan dinamika sosial memiliki peran positif dan negatif. Peran yang paling besar dalam mendukung program PLPBK di Kelurahan Karangwaru ialah lembaga sosial dimana hubungan formal maupun informal yang dilakukan memperkuat tindakan sosial dalam pelaksanaan program PLPBK. Struktur sosial yang ada di Kelurahan Karangwaru juga sudah memenuhi fungsi struktur sosial yang disebutkan oleh Hoogvelt dalam Abdulsyani (1994) dimana struktur sosial memiliki fungsi mempertahankan pola, fungsi integrasi, fungsi pencapaian tujuan, dan fungsi adaptasi. Unsur-unsur sosial masyarakat di Kelurahan Karangwaru juga sudah menerapkan *self-organization* dalam menunjang pengambilan keputusan bersama-sama dalam setiap pelaksanaan program PLPBK Kelurahan Karangwaru.

- Yogyakarta. Yogyakarta: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.
- Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta. (2015). *Profil Karangwaru Riverside*. Yogyakarta: Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta
- Heriyanti. (2015). *Komunikasi Pembangunan Memberikan Peranan Penting Bagi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus Masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta)*. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers UNISBANK (ISBN: 978-979-3649-81-8).
- Indriani, Irma. (2017). *Formasi Spasial Permukiman Kumuh Kota (Studi Kasus: Perubahan Pola Ruang Bermukim Pada Lahan di Jalan Sersan Sani Palembang)*. Jurnal Arsir Vol. 1 No, 1 Juni 2017.
- Kinseng, Rilus A. 2017. *Struktugensi: Sebuah Teori Tindakan*. Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan: Vol. 2 No. 5 Agustus 2017: Hal 127-137.
- Korten, David C dan Rudi Klauss. (1984). *People-Centered Development (Contributions toward Theory and Planning Frameworks)*. United State of America: Kumarian Press.
- Mahardika, M. Alif. (2015). *Hubungan Agen dengan Struktur dalam Perubahan Sosial Kelurahan Gundih menjadi Kampung Gundih Berseri (Studi Kasus pada Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya)*. Jurnal Mahasiswa Sosiologi Vol 1, No 2 (2015).
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2011). *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh*. Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- Muta'ali, Luthfi., & Arif R. Nugroho. (2016). *Perkembangan Program Penanganan Permukiman Kumuh di Indonesia dari Masa ke Masa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Presiden Republik Indonesia. (2014). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- Rindarjono, M. G. (2012). *"Slum" Kajian Permukiman Kumuh dalam Perspektif Spasial*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Setiadi, E. M & Usman Kolip. (2011). *Pengantar Sosiologi (Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya)*. Bandung: Kencana.
- Sotyadarpita, Ganggaya. (2016). *Peran Modal Sosial Kepercayaan Dalam Struktur Sosial Masyarakat Terhadap Rencana Pembangunan Bendungan Kuwil-Kawangkoan, Sulawesi Utara*. Jurnal Infrastruktur Vol. 2 No. 01 Juni 2016.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Yonaldi, Sepris. (2015). *Permukiman Kumuh dan Upaya Penanganannya*. Artikel. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Diakses: 18 Oktober 2017. <<http://www.p2kp.org/wartadetil.asp?mid=7422&catid=2&>>